

MEDIA

- Agro Indonesia
 Bisnis Indonesia
 Indo Pos
 Investor Daily
 Jurnal Nasional
 Kompas
 Kontan

- Koran Jakarta
 Koran Tempo
 Majalah Tempo
 Media Indonesia
 Pelita
 Rakyat Merdeka
 Republika

- Seputar Indonesia
 Sinar Harapan
 Sinar Tani
 Suara Karya
 Suara Pembaruan
 The Jakarta Post
 Fajar

TANGGAL 5/1/2020

HALAMAN 5 / 1

- RUBRIKASI Berita
 Berita Foto
 Opini/Artikel
 Tajuk
 Pojok/Karikatur

KOMODITAS**Bali Ekspor Beras Organik**

DENPASAR, KOMPAS — Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengapresiasi kepala daerah yang berkomitmen meningkatkan ekspor komoditas pertanian. Bali mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian untuk mengembangkan produk pertanian.

Syahrul menyampaikan hal itu pada penandatanganan nota kesepahaman ekspor beras organik dari Bali antara Bali Sri Organik dan Big Almond Tree, Australia. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman komitmen mendorong kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan di Bali antara Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Bali di Gedung Wanti-tilan Kertha Sabha di kompleks Jaya Sabha, rumah dinas Gubernur Bali di Kota Denpasar, Bali, Sabtu (4/1/2020).

"Langkah Bali mengekspor beras organik mengubah gambaran karena beras selalu dicitrakan impor," kata Syahrul. Produk ekspor Bali memiliki daya tarik, yakni citra dan merek dagang Bali yang sudah mendunia.

Untuk tahap pertama, kata Direktur Bali Sri Organik Ida Bagus Gede Arsana, pihaknya mengekspor 16 ton beras or-

ganik yang diproduksi kelompok Subak Sangeh dan Subak Sengempel di Kabupaten Badung. Nilai ekspor 16 ton beras organik itu 80.000 dollar Australia (sekitar Rp 774,88 juta).

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, Pemprov Bali berupaya mengembangkan pertanian. Dengan begitu, tiga sektor prioritas penggerak perekonomian Bali, yakni pertanian dalam arti luas, industri kecil dan kerajinan, serta pariwisata, lebih berimbang kontribusinya. Saat ini, ujar Koster, sektor pariwisata mendominasi pertumbuhan ekonomi Bali, sedangkan sektor pertanian tertinggal.

Koster menyatakan sedang memprogramkan pengembangan sektor pertanian hulu sampai hilir, termasuk mengembangkan pertanian organik di sektor hulu dan membangun industri pengolahan hasil pertanian di sektor hilir.

Selain beras, ujar Koster, manggis dan salak bali sudah diekspor ke China.

Ketua Dewan Pimpinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Bali Putu Arya Sedhana menyambut baik langkah gubernur dan mendukung pengembangan sektor pertanian. (COK) 2/5-1/5

<input type="checkbox"/> Agro Indonesia	<input type="checkbox"/> Koran Jakarta	<input type="checkbox"/> Seputar Indonesia	TANGGAL 4/1/2020
<input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia	<input type="checkbox"/> Koran Tempo	<input type="checkbox"/> Sinar Harapan	HALAMAN 4 / 1
<input type="checkbox"/> Indo Pos	<input type="checkbox"/> Majalah Tempo	<input type="checkbox"/> Sinar Tani	RUBRIKASI <input checked="" type="checkbox"/> Berita
<input type="checkbox"/> Investor Daily	<input checked="" type="checkbox"/> Media Indonesia	<input type="checkbox"/> Suara Karya	<input type="checkbox"/> Berita Foto
<input type="checkbox"/> Jurnal Nasional	<input type="checkbox"/> Pelita	<input type="checkbox"/> Suara Pembaruan	<input type="checkbox"/> Opini/Artikel
<input type="checkbox"/> Kompas	<input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka	<input type="checkbox"/> The Jakarta Post	<input type="checkbox"/> Tajuk
<input type="checkbox"/> Kontan	<input type="checkbox"/> Republika	<input type="checkbox"/> Fajar	<input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur

Stok Beras Bulog Aman dari Banjir

DIREKTUR Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh memastikan bencana banjir yang melanda Jabodetabek tidak mengganggu stok beras yang dikelola perseroan.

Ia mengatakan tidak ada gudang Bulog yang terendam akibat curah hujan tinggi pada malam pergantian tahun. "Semua gudang aman. Gudang di Kelapa Gading aman. Gudang di Bekasi, Tangerang, dan Cibitung juga aman. Kalau akses ke gudang itu banjir, memang iya. Tapi gudang-gudang tidak," ujar Tri, kemarin.

Dengan jumlah gudang yang sangat banyak, yakni mencapai 1.600 unit di seluruh Indonesia, ia meyakini banjir tidak akan mengganggu sistem distribusi beras.

"Bulog punya gudang di setiap kabupaten/kota, jadi distribusi tidak akan terganggu. Kalau banjir di daerah Tangerang, ya kami pasok dari gudang di Tangerang, bukan dari Kelapa Gading. Jadi kalau distribusi tidak ada masalah," tuturnya.

Dengan ketersediaan yang cukup dan penyaluran yang lancar, ia optimistis harga beras tetap akan terjaga sekalipun dalam kondisi terjadi bencana seperti saat ini.

Di luar itu, perseroan juga turut mengirimkan bantuan berupa bahan pangan,

seperti beras, gula, dan minyak goreng ke wilayah-wilayah yang terdampak banjir di kawasan Jabodetabek.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi, semua pihak harus membantu, dan Bulog sebagai salah satu komponen bangsa dan bagian dari BUMN langsung bergerak membantu warga korban banjir," kata Direktur SDM dan Umum Bagya Mulyanto.

Perum Bulog mengirimkan pasokan bahan pangan berupa puluhan ton beras, gula, dan minyak masak ke wilayah-wilayah yang terkena banjir di kawasan Jabodetabek dengan berkoordinasi dengan aparat Kodam, kepolisian, serta Pemda DKI guna membantu warga korban banjir.

Bagya yang juga koordinator bantuan bencana Bulog menyampaikan, bantuan yang diberikan sesuai dengan koordinasi yang ada dan berfokus untuk mendirikan dapur umum dengan menyediakan sementara ini masing masing 10 ton beras, 2 ton gula (dibagi per satu kilogram kantong plastik), dan 2 ton minyak kiloan.

Bulog juga mengerahkan sejumlah perahu karet untuk membantu mengevakuasi warga korban banjir agar bisa diselamatkan dari rendaman banjir. (Pra/Faw/J-1) M1/A-1/A

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input checked="" type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar |

TANGGAL 6/1/2020
 HALAMAN 16 /
 RUBRIKASI Berita
 Berita Foto
 Opini/Artikel
 Tajuk
 Pojok/Karikatur

SYAHRUL YASIN LIMPO
**Ajak Kurangi
 Makan Beras**



M/IRAMDANI

MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo, 64, mengaku mulai mengurangi makan beras atau nasi. Syahrul pun mengajak masyarakat melakukan diversifikasi pangan.

"Sebagai menteri saya berkunjung ke daerah-daerah, misalnya, Halma-hera dan Sulawesi Barat. Saya dikasih makan sagu dan ikan, dan ternyata enak sekali," kata Syahrul di Denpasar, Bali, kemarin.

Orang Indonesia, kata Syahrul, termasuk pengonsumsi beras terbesar di dunia. Satu orang Indonesia mengonsumsi lebih dari 110 kilogram beras per tahun.

Terlalu banyak mengonsumsi beras tidak baik bagi kesehatan. "Banyak orang Indonesia mengalami kegemukan dan kegemukan mengundang penyakit," kata laki-laki kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, itu.

Syahrul mengimbau masyarakat mengonsumsi pangan sesuai dengan budaya setempat atau kearifan lokal. "Yang suka makan pisang, makanlah pisang. Yang suka makan sagu, makanlah sagu. Yang suka makan jagung, makanlah jagung. Yang suka makan singkong, makanlah singkong," imbaunya.

Syahrul juga mengimbau masyarakat makan secukupnya, tidak berlebihan. Syahrul menjelaskan bahwa 30% makanan terbuang sisa-sisa. (Uka/H-2) M1-16

- Agro Indonesia
- Bisnis Indonesia
- Indo Pos
- Investor Daily
- Jurnal Nasional
- Kompas
- Kontan

- Koran Jakarta
- Koran Tempo
- Majalah Tempo
- Media Indonesia
- Pelita
- Rakyat Merdeka
- Republika

- Seputar Indonesia
- Sinar Harapan
- Sinar Tani
- Suara Karya
- Suara Pembaruan
- The Jakarta Post
- Fajar

TANGGAL 6/1/2020

HALAMAN 12 / 1

- RUBRIKASI**
- Berita
 - Berita Foto
 - Opini/Artikel
 - Tajuk
 - Pojok/Karikatur

SATU DATA Luas Lahan Sawah

● DEDY DARMAWAN NASUTION

Jika dibandingkan 2013, luas lahan sawah masih mengalami penurunan.

Verifikasi total luas lahan baku sawah di 34 provinsi telah rampung. Enam kementerian/lembaga sepakat terdapat penambahan luas baku sawah dari semula 7.105.000 hektare (ha) menjadi 7.463.918 ha. Penambahan itu diklaim akibat adanya area persawahan yang tak tertangkap oleh pencitraan satelit sebelumnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sarwo Edhy menjelaskan, data itu akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo dan bakal dijadikan rujukan bagi seluruh kementerian teknis yang berkaitan dengan kebijakan pangan. Pemerintah daerah, kata dia, berkewajiban menjaga lahan-lahan itu karena sifatnya yang tak boleh diganggu gugat.

"Sekarang satu data dan diharapkan tidak lagi ada perbedaan antarkementerian. Pemda juga harus komitmen menjaga lahan itu," kata Sarwo kepada *Republika*, beberapa waktu lalu.

Mengacu pada Laporan Luas Lahan Menurut Penggunaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2013, total luas lahan baku sawah sebesar 7,75 juta ha dengan sebaran 39,83 persen di Jawa dan 60,17 persen di luar Jawa. Dengan demikian, jika dibandingkan kondisi 2013, tren luas lahan sawah masih mengalami

penurunan akibat adanya alih fungsi lahan.

Sarwo mengatakan, sesuai aturan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), verifikasi luas baku sawah akan diperbarui

setiap lima tahun sekali. Enam kementerian/lembaga yang terlibat, yakni Kementan, Kementerian ATR, BPS, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Ia menyampaikan, instrumen pemerintah untuk menahan alih fungsi lahan, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B. Sesuai Pasal 44 Ayat 1, lahan pertanian yang sudah ditetapkan menjadi LP2B harus dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan.

Mereka yang kedapatan melakukan alih fungsi lahan tanpa izin dan syarat dapat dijerat tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda hingga Rp 5 miliar. "Jadi, jangan coba-coba mengalihfungsikan lahan tanpa seizin Kementerian Pertanian," ujar Sarwo.

Undang-undang tersebut memperbolehkan alih fungsi lahan ke nonpertanian asalkan dengan kajian kelayakan, perencanaan yang matang, dibebaskan kepemilikannya dari pemilik, serta wajib ada lahan pengganti yang sesuai. *R-16*

Akan tetapi, kata Sarwo, dari luas lahan baku sawah sebesar 7,46 juta ha, baru sekitar 5,5 juta ha sawah di 133 kabupaten dan kota yang masuk dalam kategori LP2B. Perbedaan itu diakibatkan oleh banyaknya pemerintah daerah yang belum menetapkan lahan sawahnya sebagai area LP2B. Presiden Joko Widodo, lanjut dia, sudah menginstruksikan agar

<input type="checkbox"/> Agro Indonesia	<input type="checkbox"/> Koran Jakarta	<input type="checkbox"/> Seputar Indonesia	TANGGAL 6/1/2020
<input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia	<input type="checkbox"/> Koran Tempo	<input type="checkbox"/> Sinar Harapan	HALAMAN 16 / 1
<input type="checkbox"/> Indo Pos	<input type="checkbox"/> Majalah Tempo	<input type="checkbox"/> Sinar Tani	RUBRIKASI <input type="checkbox"/> Berita
<input type="checkbox"/> Investor Daily	<input type="checkbox"/> Media Indonesia	<input type="checkbox"/> Suara Karya	<input type="checkbox"/> Berita Foto
<input type="checkbox"/> Jurnal Nasional	<input type="checkbox"/> Pelita	<input type="checkbox"/> Suara Pembaruan	<input checked="" type="checkbox"/> Opini/Artikel
<input type="checkbox"/> Kompas	<input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka	<input type="checkbox"/> The Jakarta Post	<input type="checkbox"/> Tajuk
<input type="checkbox"/> Kontan	<input type="checkbox"/> Republika	<input type="checkbox"/> Fajar	<input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur

seluruh luas lahan baku sawah menjadi LP2B. Sembari menunggu itu, Sarwo menegaskan, Kementan akan memperketat pengawasan lahan yang telah ditetapkan menjadi luas baku sawah sembari menegakkan hukum sesuai aturan-aturan yang ada. Selama ini, ia mengklaim Kementan sudah menjalankan amanat undang-undang.

Satu data

Pada 2020, Kementan masih akan melanjutkan program cetak sawah sebesar 10 ribu ha. Target itu naik dari target 2019 sebesar 6.000 ha dengan realisasinya telah mencapai 5.827 ha atau 97 persen dari target. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 200 miliar.

Namun, sebelum rencana itu dieksekusi, pemerintah harus mengevaluasi efektivitas cetak sawah pada tahun ini. Program cetak sawah baru harus benar-benar dimanfaatkan petani dan bisa menghasilkan beras.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementan I Ketut Kariyasa mengatakan, pihaknya ke depan akan memperkuat koordinasi dengan BPS untuk mewujudkan satu data pertanian. Kolaborasi diperlukan dari tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten, hingga kecamatan. Lewat harmonisasi data antarkementerian/lembaga, diharapkan data pertanian akan jadi lebih akurat.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan kebijakan satu data akan membantu pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap alif fungsi lahan. Ia mengandalkan sepenuhnya teknologi citra satelit.

"Pemotretan citra satelit, kita akan tahu di mana saja lahan baku sawah. Bahkan, yang terkonversi bisa kita ketahui," kata Syahrul.

Dua pekan lalu, dalam kunjungan kerjanya ke Purwakarta, Jawa Barat, Syahrul secara langsung meminta para kapolres untuk menangkap para pejabat daerah yang mengalih-fungsikan lahan pertanian. Ia menegaskan, menjaga lahan pertanian harus dibarengi dengan mempersempit ruang gerak mafia lahan.

Di sisi lain, ia pun mengingatkan pejabat daerah untuk ikut bersama-sama menutup celah yang bisa melenyapkan lahan pertanian demi mempertahankan ketahanan pangan.

Terlepas dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi gusuran lahan sawah akibat pembangunan, Syahrul juga menginginkan

agar fokus Kementan tak sekadar pada luas lahan. Menurut dia, selain ekstensifikasi, intensifikasi dengan mendongkrak produktivitas tak boleh dilupakan.

Saat ini, rata-rata produktivitas padi masih sekitar 5,2 ton per ha. Syahrul ingin produktivitas naik minimal 7 ton per ha. Melihat rendahnya produktivitas itu, dia menyoroti bantuan subsidi pupuk yang lebih dari Rp 25 triliun setiap tahunnya. "Dipikir anggaran itu kecil? Sudah dikasih, tapi produktivitas tetap rendah. Pupuk harus sampai ke petani. Jaksa Agung harus mengawasi ini," ujarnya.

Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengaku saat ini akan memperbaiki data empat komoditas pertanian. Selain padi, ada pula sawit, jagung, dan gula. BPS bersama kementerian dan lembaga terkait baru bisa menyelesaikan data untuk padi. Ia mengakui, mendata jutaan hektare area pertanian merupakan pekerjaan yang menantang.

Suhariyanto menyampaikan, BPS khusus bertugas untuk melakukan penghitungan produksi dan produktivitas atas data pertanian yang ada. Sementara, pemerintah berke-wajiban menjaga lahan pertanian itu agar tetap lestari.

Sebab, tak bisa dimungkiri praktik alih konversi lahan akan sangat mudah terjadi di tengah tantangan iklim usaha pertanian dan pembangunan infrastruktur di daerah. "Pemerintah sudah membuat peta pertanian karena kalau tidak konversi lahan akan jalan terus. Mendata ini tidak mudah karena kami harus ke sana-kemari mengecek lapangan," kata Suhariyanto. ■ ed: ahmad fikri noor

2

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input checked="" type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Fajar |

TANGGAL 6/1/20/20

HALAMAN 16 /

- RUBRIKASI**
- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Berita |
| <input type="checkbox"/> Berita Foto |
| <input checked="" type="checkbox"/> Opini/Artikel |
| <input type="checkbox"/> Tajuk |
| <input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur |

Membendung Alih Fungsi Lahan

● DEDY DARMAWAN NASUTION

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan, alih fungsi lahan pertanian sulit untuk dicegah secara menyeluruh. Winarno menjelaskan, pembangunan akan terus berlangsung seiring tingkat pertumbuhan jumlah penduduk sekitar 1,3 persen per tahun.

"Ini bisa dibayangkan, pasti kebutuhan tempat tinggal dan bangunan akan memaksa alih fungsi lahan meski sudah ada Undang-Undang PLP2B," ujar Winarno kepada *Republika*, pekan lalu.

Menurut dia, menyetop alih fungsi lahan tak bisa berjalan optimal karena UU Perlindungan LP2B butuh turunan berupa peraturan daerah yang dikeluarkan setiap kepala daerah. Turunan undang-undang itu harus dituangkan dalam pembentukan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Selain itu, perlu ada penugasan secara tegas langsung dari presiden dan menteri dalam negeri.

"Penugasan ini perlu dilakukan agar alih fungsi lahan menjadi lambat. Ketika tata ruang lengkap, pembangunan akan lebih teratur," kata dia.

Winarno menuturkan, RTRW akan memperjelas wilayah lahan pertanian dan bangunan. Sebagai contoh, RTRW akan memetakan area tanah yang tidak potensial untuk ditanami komoditas pertanian sehingga dapat dimanfaatkan untuk perumahan rakyat. Sementara, lahan-lahan subur akan dipertahankan untuk lahan pertanian.

Tanpa ada RTRW yang jelas, menurut Winarno, alih fungsi lahan pertanian menjadi semakin sulit dibendung. Ia meminta pemerintah untuk memberikan insentif bagi petani pemilik lahan yang sawahnya masuk dalam wilayah baku sawah. Menurut Winarno, petani perlu dibebaskan dari kewajiban pajak bumi dan bangunan. Meski jumlahnya kecil, menurut dia, hal itu akan sangat membantu petani. Pembebasan itu dengan catatan lahan yang dimiliki tidak boleh dibangun rumah untuk keluarga.

Insentif lain, yakni kepastian mendapatkan pupuk bersubsidi dan

kepastian pasar untuk menjual hasil panennya. Lebih lanjut, petani juga bisa mendapatkan asuransi. Lengkapnya insentif itu akan mendorong petani untuk menjaga area lahan yang dimilikinya. "Kalau sekarang hanya aturan di atas, tapi petani tidak dilibatkan. Siapa yang memberi tahu mereka? Tanah-tanah saya, apa urusannya. Kan begitu petani berpikirnya," kata dia.

Salah satu daerah lumbung padi nasional yang terus mengalami tekanan alih fungsi lahan, menurut Winarno, adalah Karawang, Jawa Barat. Dia meminta pemerintah dari pusat hingga level kabupaten mencermati hal ini agar status lumbung padi Karawang tidak menjadi sejarah.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, pemerintah pusat dan daerah harus kompak. Senada dengan Winarno, RTRW wajib ada dan digunakan sebagai landasan pemetaan pembangunan daerah: "Selama belum ditetapkan, ini semua akan menjadi abu-abu dan sangat terbuka untuk mengalihfungsikan lahan tanpa menggantinya," ujar dia.

Khudori menilai, kepala daerah yang belum menetapkan RTRW berarti sengaja membiarkan alih fungsi lahan terjadi. Karena itu, pemerintah pusat harus memaksa daerah menyelesaikan RTRW. RTRW, kata dia, menjadi amanat dari UU 41/2009. "Masa sudah 10 tahun RTRW belum jadi juga? Ini sampai kapan?" kata dia.

■ ed: ahmad fikri noor